

## Banyumas Gelar Operasi Pasar Beras

**BANYUMAS (KR)** - Naiknya harga beras di pasaran yang masih dirasakan oleh warga membuat Pemkab Banyumas, Bulog, dan Bank Indonesia, Sabtu (28/1) menggelar operasi pasar beras di tiga lokasi, Pasar Manis, Pasar Wager, dan Pasar Sokaraja. "Operasi pasar beras nantinya juga akan dilakukan menyeluruh ke desa dan kecamatan," kata Bupati Banyumas Achmad Husein saat memimpin langsung melakukan operasi pasar di Pasar Manis Purwokerto. Operasi pasar beras yang melibatkan Bulog Banyumas, dan Bank Indonesia sebagai usaha untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

Bupati Banyumas Achmad Husein menjelaskan operasi pasar beras merupakan tindak lanjut dalam upaya pengendalian inflasi lantaran harga beras melonjak sangat tinggi dari bulan lalu. "Musim paceklik di Banyumas ini berakhir pada akhir Februari atau awal Maret oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan dan mengendalikannya," ungkapnya.

Pengendalian harga beras dilakukan dengan memberikan subsidi transportasi pada beras jenis IR premium dan pengawasan pada beras Bulog. "Harga beras Bulog medium dengan harga Rp 9.000/kg, Bulog premium Rp 12.000/kg dan IR premium Rp 11.500/kg. Jika nanti ditemukan ada harga di atas yang sudah ditentukan maka akan dikenakan peringatan terhadap pedagang hingga pencabutan izin," tegas Achmad Husein. **(Dri)-d**



**Bupati Banyumas Achmad Husein memimpin operasi pasar beras.**

## ASN Setda Karanganyar Jalani Tes Darah

**KARANGANYAR (KR)** - Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setda Pemkab Karanganyar menjalani tes darah untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Kegiatan tersebut digelar dua kali dalam setahun. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra Setda Pemkab Karanganyar, Indarwati mengatakan pihaknya mengundang 133 ASN yang bekerja di Gedung Setda guna menjalani tes darah. Bagian Kesra menggandeng dokter dan medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). "Ada 12 orang dari DKK yang memeriksa. Ada dokter dan medisnya," katanya kepada wartawan di sela kegiatan tersebut, Senin (30/1).

Tes darah bagi seratusan ASN tersebut bertajuk Pelaksanaan Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar tentang Kesehatan yang berlangsung di ruang Podang 1 Setda Karanganyar. Para ASN dites darah untuk mengetahui kadar gula darah, asam urat dan kolesterol. Berdasarkan hasil cek darah, mayoritas ASN yang berusia lebih dari 40 tahun tersebut perlu menjalani terapi dan pengobatan agar penyakitnya itu sembuh.

"Belum selesai ceknya. Tapi kebanyakan langsung konsultasi ke dokter DKK yang standby usai cek darah. Memang di usia tidak muda lagi dan dengan beban pekerjaan serta pola makan, perlu diperbaiki agar selalu sehat," katanya. Sebagian kepala OPD di Kantor Setda berhalangan mengikuti tes darah. Mereka sedang mengikuti capacity building di Surabaya, Jatim. Indarwati akan menjadwalkan ulang tes darah bagi mereka di lain hari. **(Lim)-d**

## Prodi Kompak Polines Raih Akreditasi Internasional



**Direktur (tengah) bersama Wadir 1, Kajur, Kaprodi dan sejumlah dosen.**

**SEMARANG (KR)** - Program Studi (Prodi) Komputerisasi Akuntansi (Kompak) Sarjana Terapan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang (Polines) berhasil mendapatkan akreditasi internasional HEEACT (Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) lembaga akreditasi internasional independen dari Taiwan.

Direktur Polines Prof Dr Totok Prasetyo BEng (Hons) MT IPU ASEAN, Eng ACEP di ruang kerja Direktur, Kampus Polines, Tembalang, Semarang, Jumat (27/1) merasa senang dan bangga Prodi Kompak bisa mendapatkan akreditasi internasional. Prodi ini sebelumnya sudah mendapatkan akreditasi A secara nasional makanya diikutkan untuk akreditasi internasional.

Prof Totok menambahkan, diraihnya akreditasi internasional ini sekaligus sebagai implementasi 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Sehingga semakin banyak prodi yang mendapatkan akreditasi maka Kemendikbudristek akan memberikan penghargaan dan dana tambahan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai bonus keunggulan IKU. "Capaian ini akan meningkatkan akreditasi institusi. Polines berharap ke depan 27 prodi di Polines bisa mendapatkan peningkatan akreditasi baik nasional maupun internasional," ujar Direktur Polines.

Ketua Jurusan Akuntansi Polines Siti Arbainah SE MM dan Ketua Prodi Kompak Sarjana Terapan Akuntansi Afiat Sadida SKom MM menyampaikan rasa syukur Proses Akreditasi Internasional ini memperoleh dukungan penuh dari Pimpinan Polines. **(Sgi)-d**

## Pemprov Jateng Gencarkan Vaksinasi PMK

**SEMARANG (KR)** - Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk memutus penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) secara sistematis. Tahun ini (2023), 2,4 juta ekor sapi ditargetkan untuk divaksin.

Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan hal ini saat Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan PMK 2023 di Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Nyawiji Ki Semar Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Sabtu (28/1). Kegiatan itu digelar serentak di 29 provinsi.

"Kami berharap dengan dilakukan vaksinasi ini akan dapat mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkuku belah. Melalui program tersebut diharapkan Jateng bisa segera terbebas dari penyakit kuku dan mulut," ujar Sujarwanto. Ia mengatakan, Jateng merupakan sentra produsen sapi terbesar nomor dua setelah Jawa Timur. Dampak dari PMK tidak hanya menginfeksi ternak, namun juga berdampak pada perekonomian daerah dan pendapatan peternak, serta kebutuhan pangan hewani masyarakat.

Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah

menunjukkan, populasi hewan rentan atau dapat tertular PMK di Jateng sebanyak 8.286.530 ekor. Jumlah itu terdiri dari sapi potong sebanyak 1,87 juta ekor, sapi perah sekitar 142.510 ekor, kerbau sebanyak 58.190 ekor, domba 2,33 juta ekor dan babi sebanyak 88.290 ekor. "Ternak tersebut dipelihara oleh 2,17 juta penduduk Jateng dan jika kita kalkulasikan, nilai asset ternak di Jateng ini Rp 43,75 triliun, sehingga penanganan PMK dan penyakit hewan lainnya mendapatkan etensi khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jateng," urainya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Jateng, Agus Wariyanto menyampaikan, vaksinasi untuk 2,4 juta ekor ternak diperuntukan bagi ternak yang belum divaksin maupun vaksin lanjutan. Hingga kini, total pelaksanaan vaksinasi PMK telah mencapai 1.359.801 dosis atau 91,2 persen dari distribusi



**Petugas melakukan vaksinasi PMK di kandang ternak.**

vaksin yang diterima dari Kementerian Pertanian.

Untuk penanganan PMK, Pemda Jateng telah melakukan beberapa upaya, diantaranya pembentukan tim Satgas PMK dan pembentukan Kelompok Kerja URC PMK di Disnakeswan, investigasi lapangan atas laporan terduga PMK dari kabupaten/kota berupa penelusuran kejadian kasus dan pengambilan sampel, mempercepat lalu lintas ternak di 10 titik perbatasan.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian, Syamsul Ma'arif

menyampaikan, Kementan dan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK agar target pengendalian PMK dapat tercapai.

"Kegiatan kick off vaksinasi dan penandaan ternak ini merupakan tekat dan kerja kita semua untuk melanjutkan program penanggulangan wabah PMK di Indonesia," ungkap Syamsul. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada peternak sebanyak 127 ribu liter desinfektan untuk 35 kabupaten/kota dan 159.000 botol obat-obatan. **(Bdi)-d**

## KPU Sukoharjo Buka Pendaftaran Pantarlih

**SUKOHARJO (KR)** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo membuka pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 mulai 26-31 Januari 2023. Total kebutuhan sebanyak 2.806 orang untuk bertugas di semua wilayah Kabupaten Sukoharjo. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sukoharjo Suci Handayani, Minggu (29/1) mengatakan, KPU Kabupaten Sukoharjo membutuhkan 2.806 orang Pantarlih untuk Pemilu 2024. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 26 Januari dan berakhir pada 31 Januari 2023. Jumlah 2.806 tersebut sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab dalam 1 TPS membutuhkan 1 orang Pantarlih.

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan dan berkedudukan di lingkungan TPS.

Adapun persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, berdasarkan pasal 50 PKPU no 8 Tahun 2022 yakni, warga negara Indonesia yang berusia paling rendah tujuh belas tahun, berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih, mampu secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan tidak menjadi anggota partai politik

atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan yang harus dipenuhi adalah, surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih, yang formatnya sudah ada di pengumuman, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b, Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat, surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau

klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, daftar riwayat hidup (sudah disediakan formatnya), pas foto berwarna 4x6.

Pantarlih mempunyai tugas menjelaskan Suci, membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Mam)-d**

## Bendungan Siluwur dan Pilang Tunggu Pembangunan

**SUKOHARJO (KR)** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo selesai membuat desain ulang pembangunan dua bendungan di wilayah Kecamatan Weru yakni Bendungan Siluwur di Desa Tegalsari dan Bendungan Pilang di Desa Karangwuni. Pembangunan dua bendungan tinggal menunggu waktu saja dan kesiapan anggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Senin (30/1) mengatakan, kondisi dua bendungan yakni Bendungan Siluwur dan Bendungan Pilang sudah sangat memprihatinkan karena merupakan bangunan lama. Bendungan

sudah tidak lagi berfungsi secara maksimal dan justru menimbulkan masalah karena menjadi titik penumpukan sampah. Hal tersebut diketahui khususnya di pintu air setelah terdampak kayu dan bambu yang terbawa banjir dan menyumbat aliran air.

Kondisi Bendungan Siluwur dan Bendungan Pilang juga mengalami kerusakan parah. Hal ini membahayakan bagi warga saat berada disekitar bendungan.

"Desain sudah jadi. Sudah siap untuk dua bendungan semua berada di wilayah Kecamatan Weru yakni Bendungan Siluwur di Desa Tegalsari dan Bendungan Pilang di Desa Karangwuni. Tidak hanya satu tapi dua bendungan sekaligus siap," ujarnya.



**Kondisi Bendungan Siluwur di Desa Tegalsari Kecamatan Weru.**

DPUPR Sukoharjo menyelesaikan desain dua bendungan baik Bendungan Siluwur dan Bendungan Pilang pada akhir tahun 2022 lalu. Desain dibuat dengan mengikuti kondisi perkembangan sekarang. Bowo menjelaskan, de-

ngun. Belum ada anggarannya. Tapi desain sudah ada," lanjutnya. Untuk pembangunan, dijelaskan Bowo nantinya akan dibangun ulang semua. Termasuk pengerukan sedimentasi di bendungan mengingat kondisinya sudah parah.

"Pengerukan sedimentasi akan dilakukan saat musim kemarau dengan kondisi tidak terlalu banyak air. Saat hujan justru rawan banjir," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo setelah ini akan menyerahkan hasil desain dua bendungan baik Bendungan Siluwur dan Bendungan Pilang ke Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hal ini sebagai laporan dan koordinasi terkait kesiapan pembangunan. **(Mam)-d**

## Tanam Pohon untuk Selamatkan Lahan Kritis

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama masyarakat Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, dan anak sekolah, melakukan penanaman pohon di lahan kritis daerah aliran sungai (DAS) Tuntang. 1.500 bibit pohon ditanam untuk menyelamatkan lahan kritis serta mencegah longsor dan banjir di wilayah tersebut.

Demikian dikatakan Ganjar Pranowo usai menanam bibit pohon dan berdialog dengan warga di DAS Tuntang, Sabtu (28/1). Penanaman pohon dilakukan serentak di Jateng dengan total 15.000 bibit pohon. Penanaman dilakukan di beberapa daerah di Jateng. "Ini serentak seluruh Indonesia. Yang pertama kita diperintah oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Hari ini di ekse-

matkan lahan kritis, mencegah abrasi DAS, sedimentasi sungai, hingga mencegah longsor dan banjir. Itu sudah menjadi tugas bagi semua elemen masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan.

"Keserentakan ini kita harapkan sebagai wujud yang menjadi tugas-tugas



**Ganjar Pranowo bersama masyarakat, TNI dan Polri, melakukan penanaman pohon di lahan kritis.**

kita semuanya. Kalau seluruh partai peduli, ada kadernya, yang jadi eksekutif, yang jadi legislatif, yang jadi struktural itu gerakan semuanya. Kita sudah ada program yang sudah jalan maka kita tinggal masuk untuk ditanam bersama," tutur Ganjar.

Pantauan di lokasi, areal di sekitar DAS Tuntang di Desa Nyemoh terlihat gundul. Padahal air di sungai itu juga mengalir sampai ke daerah lain seperti Kabupaten Grobogan yang beberapa waktu lalu sejumlah desa sempat terendam banjir. Salah satu penyebab banjir di Grobogan itu adalah adanya luapan air dari Sungai Tuntang yang melintas di Sungai Lusi dari arah Blora. Untuk daerah pertemuan dua arus itu, Gubernur minta agar segera dicarikan solusi. Untuk itu, dalam program

penanaman bibit pohon juga melibatkan Dinas Pustataru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala desa, dan perwakilan kepada daerah.

Kepada warga Ganjar menjelaskan mengenai persentase tanaman yang ada di hutan, dataran tinggi, dan daerah aliran sungai. Sesuai peraturan, persentase itu telah ditetapkan yakni 50 persen harus ditanami tanaman keras, 20 persen MPTS, dan 30 persen yang ditanami untuk perhutanan sosial.

"Maka 30 persen itu tempatnya di mana, bagaimana cara menanamnya kita yang mendampingi sehingga hutannya terlindeungi, terjaga, terawat, dan bisa dikonservasi, lahan-lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk rakyat," tutur Ganjar Pranowo. **(Bdi)-d**